Perlindungan Hukum Tindakan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) oleh Korban Kekerasan Seksual

Sylvira Nur Andini; Tias Dijayanti; Sifa Fadilah; Sarah Safira Septhianova; Ummi Maskanah. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, sylviranurandini211@gmail.com

ABSTRACT: The action of forced defence, known as noodweer exces, is a complex legal issue, especially when it involves victims of sexual violence. Forced defence in Indonesian law is regulated in Article 49 of the Criminal Code. It makes it possible to exempt a person from punishment or make a person who commits a criminal act go unpunished. However, there are various interpretations of the article. Through a normative juridical research approach, this study aims to analyze how Indonesian criminal law views and regulates such acts, especially in the context of legal protection for victims of sexual violence. This is important given that the legal protection of victims of sexual violence in Indonesia is still not optimal due to a lack of understanding of the psychological impact of sexual violence and how this psychological condition affects the actions taken by victims.

KEYWORDS: Noodweer Exces, Victims of Sexual Violence, Legal Protection.

ABSTRAK: Tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau dikenal dengan istilah *noodweer exces* merupakan isu hukum yang kompleks, terutama ketika melibatkan korban kekerasan seksual. Tindakan pembelaan terpaksa dalam hukum Indonesia diatur dalam Pasal 49 KUH Pidana. Aturan tersebut memungkinkan untuk membebaskan seseorang dari hukuman atau membuat seseorang yang melakukan tindakan pidana tidak dihukum. Namun, terdapat berbagai interpretasi terkait pasal tersebut. Melalui pendekatan penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana Indonesia memandang dan mengatur tindakan tersebut, terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Hal ini penting mengingat bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia masih belum optimal karena kurangnya pemahaman mengenai dampak psikologis dari kekerasan seksual dan bagaimana kondisi psikologis ini mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh korban.

KATA KUNCI: *Noodweer Exces*, Korban Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang sangat kompleks dan mendalam dalam masyarakat. Tindak kekerasan seksual tidak hanya meninggalkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam pada korbannya, tetapi juga menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks. Korban kekerasan seksual seringkali menghadapi situasi yang sulit saat mencoba melindungi diri mereka sendiri. Dalam situasi ekstrem, korban kekerasan seksual mungkin melakukan tindakan pembelaan diri yang melewati batas ketentuan dan dilarang oleh Hukum Pidana di Indonesia. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dikenal dengan istilah *noodweer exces* dapat terjadi ketika seseorang melakukan tindakan dalam upaya membela diri, namun tindakan tersebut melebihi batas yang wajar karena adanya tekanan atau ketakutan. Dalam konteks korban kekerasan seksual, *noodweer exces* sering kali dipicu oleh rasa cemas dan ketakutan yang tidak terkendali. Sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk memahami bagaimana hukum melihat dan melindungi tindakan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap *noodweer exces* oleh korban kekerasan seksual ini menjadi sangat krusial, mengingat kondisi psikologis korban kekerasan seksual yang sering kali berada dalam tekanan. Menurut Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *noodweer exces*, yang dilakukan karena adanya kegoncangan jiwa yang parah akibat serangan atau ancaman serangan yang terjadi secara mendadak tidak dapat dikenai pidana. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang bagi pemahaman atas reaksi spontan dan tidak terkontrol dari korban dalam situasi ekstrem. Akan tetapi, implementasi pasal ini sering kali menimbulkan perdebatan dalam penegakan hukum, terutama karena adanya kesulitan dalam menilai sejauh mana tindakan pembelaan tersebut dapat dianggap wajar atau melampaui batas. Tidak jarang terjadi kasus di mana korban kekerasan seksual menjadi tersangka karena membela diri. Contohnya adalah ketika seorang wanita yang menjadi korban pelecehan seksual kemudian ditangkap oleh polisi setelah ia menyiram pelaku dengan air keras, yang videonya menjadi viral di media sosial.

Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan menganalisis tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara mendalam. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana hukum Indonesia saat ini mengakomodasi kebutuhan perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang melakukan *noodweer exces* dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum di masa mendatang.

II. METODE

Penelitian hukum ilmiah perlu menerapkan metode penelitian untuk mendapatkan arah penelitian yang lebih komprehensif. Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara untuk memecahkan suatu masalah. Sementara itu, penelitian didefinisikan sebagai pemeriksaan yang teliti, tekun, dan menyeluruh terhadap suatu fenomena untuk meningkatkan pengetahuan manusia. Dengan demikian, metode penelitian adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara yang digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Secara ringkas, studi ilmu hukum bertujuan untuk mempelajari tujuan, nilai-nilai keadilan, kebaikan, dan keburukan dari suatu aturan, serta konsep-konsep dan norma hukum. Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap tindakan pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) oleh korban kekerasan seksual adalah studi yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan analisis teoritis dan aplikasi hukum dalam konteks yang bersangkutan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian kepustakaan yang meliputi bahan hukum dan non-hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *Noodweer Exces*, yaitu “Pasal 49 ayat (2) KUHP”. Selain itu, peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual juga digunakan sebagai sumber data penelitian ini. Sedangkan, bahan

non-hukum yang dikaji berupa dokumen dokumen resmi, meliputi buku, jurnal hukum, makalah, artikel, surat kabar dan lain-lain..

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Tindakan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas, atau yang dikenal sebagai *noodweer exces*, adalah tindakan pembelaan diri dimana seseorang merasa cemas atau takut secara intens sehingga keadaan jiwa atau batinnya terganggu, yang menyebabkan individu tersebut bereaksi dengan pembelaan diri yang melebihi batas yang diperlukan (Refin & Nur Azizi, 2023). Konsep tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) ini mengacu pada situasi di mana seseorang dalam keadaan terdesak dan dalam menanggapi suatu serangan atau ancaman serangan, melakukan tindakan yang melebihi apa yang diperlukan untuk membela diri.

Dalam hukum Indonesia, tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) diatur dalam “pasal 49 ayat (2) KUH Pidana” yang menyatakan bahwa, “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.” *Noodweer exces* dapat dibenarkan secara hukum apabila tindakan pembelaan dilakukan atas dasar adanya goncangan jiwa yang parah akibat ancaman atau serangan. Namun, penting diingat bahwa ketika seseorang melakukan pembelaan diri terdapat batas-batas yang tidak boleh dilewati dalam hukum positif Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan asas dalam *noodweer*, yaitu asas keseimbangan. Jika seseorang mengalami "goncangan jiwa", maka tindakan pembelaan dirinya dapat dikecualikan dari prinsip keseimbangannya, sesuai dengan ketentuan dalam “Pasal 49 ayat (2) KUH Pidana”. Namun, konsep "goncangan jiwa" ini mengundang berbagai interpretasi dari berbagai pihak karena tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan pasal-pasal KUH Pidana. Selain

itu, dalam “Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa” yang telah diubah oleh “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023”, tidak terdapat definisi yang spesifik mengenai "kegoncangan jiwa".

Ditinjau dari tata bahasa kegoncangan jiwa yang hebat dalam “Pasal 49 Ayat (2) KUH Pidana” memiliki tiga suku kata, yaitu “kegoncangan”, “jiwa”, dan “hebat”. Untuk memberikan definisi yang lebih rinci, akan digunakan metode penafsiran gramatikal. Metode ini melibatkan penelitian arti tiap kata dalam kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia. Berdasarkan penafsiran gramatikal, makna dari ketiga kata "kegoncangan", "jiwa", dan "hebat" adalah kondisi psikologis seseorang yang tidak stabil, yang menghasilkan perasaan gelisah, takut, tidak aman, atau cemas yang sangat intens (dahsyat), yang mengakibatkan terganggunya keadaan jiwa atau psikis seseorang (Wardhana Bagus, 2015).

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa tokoh menyampaikan pendapatnya. Salah satu individu yang menyampaikan pandangannya adalah Prof. Satochid Kartanegara. Dia mengungkapkan bahwa goncangan jiwa adalah keadaan di mana jiwa sangat tertekan. Tiraamidjaja mengemukakan pandangan lain yang disebut sebagai "gerak jiwa yang intens". Di sisi lain, Utrecht mendefinisikan goncangan jiwa sebagai "perasaan panas hati yang mendalam". Pendapat terakhir berasal dari Marapaung yang memberikan definisi goncangan jiwa sebagai “kondisi dimana seseorang tidak normal dalam berfikir” (Anggraeni & Mahyani, 2022).

Perbedaan penafsiran tersebut mencakup elemen-elemen yang harus hadir dalam situasi *noodweer excess*:

1. Melakukan pembelaan yang melebihi kebutuhan yang diperlukan. Hal ini terjadi ketika seseorang dalam pembelaan diri menggunakan kekerasan yang lebih besar daripada yang digunakan oleh pelaku serangan, dengan tujuan untuk memungkinkan dirinya untuk melarikan diri.

2. Adanya guncangan jiwa yang terjadi dengan intensitas yang signifikan. *Noodweer excess* dapat timbul karena guncangan jiwa, sebagaimana diatur dalam “Pasal 49 Ayat (2) KUH Pidana”.
3. Kausalitas antara guncangan jiwa dan serangan. Jika *noodweer excess* yang dilakukan mengakibatkan kerugian kepada orang lain dan melanggar hukum, tetapi dalam keadaan yang ekstrem seperti itu, dapat menjadi alasan untuk pengampunan dan pembenaran sehingga dapat menghapuskan pidana, dan dengan demikian membebaskan pihak yang membela diri dari tuntutan hukum.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang tidak dijatuhi pidana karena guncangan jiwa yang hebat, tindakan membela diri yang melebihi batas tetap dianggap melanggar hukum. *Noodweer exces* yang diatur dalam “Pasal 49 Ayat (2) KUH Pidana” ini berubah menjadi dasar pemaaf.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual yang Melakukan Tindakan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain, dengan tujuan memberikan masyarakat kesempatan untuk menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum (Satjipto Rahardjo, 2000). Sementara menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari berbagai pihak (C.S.T. Kansil, 1989).

Secara umum, ada dua jenis perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berfungsi sebagai langkah pencegahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan batasan dalam pelaksanaan kewajiban. Di sisi lain, perlindungan hukum represif

bertujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang sudah terjadi akibat pelanggaran, dengan memberlakukan sanksi terhadap pelaku.

Kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk tindakan yang melibatkan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan atau ketika korban tidak menginginkannya, serta perilaku seksual yang tidak pantas atau tidak diinginkan oleh korban (Aplian, 2022). Kejadian kekerasan seksual dapat menimpa siapa pun dan kapan pun. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menetapkan definisi dan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan hukum. Kekerasan seksual meninggalkan trauma fisik dan psikis yang mendalam terhadap korbannya. Psikis yang terganggu memungkinkan setiap orang melakukan suatu perbuatan yang di luar kendalinya, termasuk perbuatan yang melanggar hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual merupakan isu yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Memberikan perlindungan kepada korban adalah cara untuk memastikan keadilan terpenuhi dalam masyarakat. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual dinilai dalam pelaksanaannya belum efektif karena masyarakat belum sepenuhnya memahami penyebab dan konsekuensi dari kekerasan seksual, dan layanan perlindungan korban yang disediakan oleh negara belum optimal. Banyak ditemukan kasus di mana korban kekerasan seksual yang menjadi pelaku akibat ia melakukan tindakan pembelaan diri.

Berangkat dari penjelasan di atas, perlu diketahui bahwa ada tiga bentuk respons otak ketika seseorang mendapat serangan kekerasan, yaitu respons melarikan diri (*flight response*), respons melawan (*fight response*), dan respons kaku (*freeze response*) di mana korban menjadi tidak berdaya dan tidak melakukan tindakan apa pun karena terkejut atau ketakutan. Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat dua konsep yang dapat menghapuskan atau mencegah hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindakan pidana, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Alasan pembenar adalah alasan yang membuat tindakan tersebut tidak dianggap melanggar hukum, seperti dalam kasus pembelaan diri yang terpaksa, kewajiban undang-undang, atau perintah yang sah. Sedangkan alasan pemaaf berkaitan dengan kondisi pelaku, di mana perbuatan tetap dianggap melanggar hukum tetapi pelaku tidak dapat dihukum karena tidak ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila menilik “Pasal 49 ayat (2) KUH Pidana” diketahui syarat terpenuhinya *noodweer exces*, yaitu timbulnya reaksi berlebih karena “kegoncangan jiwa yang hebat” pada seseorang. Seorang pakar hukum pidana Belanda, Hazewinkel Suringa, menginterpretasikan ini sebagai keadaan ketakutan dan kebingungan, namun kemudian diterjemahkan sebagai kondisi jiwa yang sangat tertekan atau hebat (Siti Aminah Tardi, 2021). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan seksual tidak akan dipidana jika mereka melakukan pembelaan terpaksa karena goncangan jiwa yang parah. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran penting dalam menginterpretasikan unsur-unsur “Pasal 49 ayat (2)” dalam suatu kasus kekerasan seksual dengan dibantu ilmu pengetahuan lain seperti ilmu psikologi dan sosiologi untuk mengetahui keadaan psikis korban kekerasan seksual dan bagaimana kekerasan seksual tersebut berdampak pada keadaan korbannya.

IV. KESIMPULAN

Tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) ini mengacu pada situasi di mana seseorang menghadapi suatu keadaan yang mendesak dan berupa suatu serangan atau ancaman serangan, dan dalam menanggapi keadaan tersebut ia melakukan tindakan yang melebihi dari apa yang diperlukan. Dengan kata lain, *noodweer exces* merupakan tindakan pembelaan terpaksa dimana seseorang mengalami perasaan cemas atau takut yang mengakibatkan terganggunya keadaan jiwa atau batin individu tersebut, yang menyebabkan ia mengubah serangan menjadi tindakan pembelaan diri yang berlebihan. Tindakan tersebut diatur dalam “pasal 49 ayat (2) KUH Pidana”. Pada dasarnya, tindakan tersebut merupakan

permasalahan hukum yang rumit, apalagi melibatkan korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, korban kekerasan seksual memiliki perlindungan hukum apabila ia melakukan *noodweer exces* karena kekerasan seksual merupakan tindakan yang memberikan dampak fisik dan psikis yang mendalam pada korbannya. Dampak psikis tersebut dapat menimbulkan kegoncangan jiwa yang hebat, maka unsur “pasal 49 ayat (2) KUH Pidana” tersebut terpenuhi. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah menghapuskan hukuman pada korban kekerasan seksual atas tindak pidana yang ia lakukan kepada seseorang atau sekelompok yang melakukan kekerasan seksual kepadanya.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraeni, E. P., & Mahyani, A. (2022). Noodweer dan Noodweer Exces Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 383–394. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.140>
- Aplian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *LEXRenaissance*, 2, 69–83.
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Refin, F. R., & Nur Azizi, S. D. (2023). Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Legal Basis of Forced Defense (Noodweer) and Forced Defense Exceeding Limits (Noodweer Exces). *Jurnal Fundamental JUSTICE*, 4, 14.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Siti Aminah Tardi. (2021, April 1). Korban Perkosaan Yang Membela Diri Harusnya Mendapat Perlindungan Hukum. konde.co.
- Wardhana Bagus, A. (2015). Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa yang Hebat dalam Pasal 49 Ayat(2) KUHP Berkaitan dengan Tindak Pidana.